

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Keterandalan Pelaporan Keuangan

2.1.1.1. Pengertian Keterandalan Pelaporan Keuangan

Menurut Renyowijoyo (2013:20), pengertian Keterandalan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Informasi yang disajikan bebas dari bias dan kesalahan yang signifikan, menyatakan setiap fakta dengan jujur dan dapat dibuktikan kebenarannya.”

Sedangkan menurut PSAK 45 tahun 2015, pengertian Keterandalan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Keterandalan pelaporan keuangan merupakan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.”

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa keterandalan pelaporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bebas dari kesalahan yang signifikan, menyatakan setiap fakta dengan jujur, dapat diverifikasi serta dapat dibuktikan.

2.1.1.2. Indikator Keterandalan Pelaporan Keuangan

Menurut Donald E. Kieso (2017:10), indikator variabel keterandalan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Penyajian dengan sebenarbenarnya.
2. Menyajikan semua laporan yang diperlukan.

3. Informasi yang disajikan dapat diuji.

4. Informasi disajikan secara umum.

Menurut SPAP SPR 2400, indikator variabel keterandalan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Penyajian jujur

2. Realisasi

3. Rekonsiliasi

4. Informasi dapat diuji

5. Netralitas

6. Pengarahan Informasi

Berdasarkan uraian diatas, indikator keterandalan laporan keuangan yang digunakan didalam penelitian ini yaitu; penyajian yang jujur, menyajikan semua laporan yang diperlukan, rekonsiliasi, informasi dapat diuji, netralitas dan disajikan secara umum.

2.1.2. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

2.1.2.1. Pengertian Kapasitas SDM

Menurut Bintoro dan Daryanto (2017:15), pengertian Kapasitas Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

“Suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal.”

Menurut Desseler (2015:3), pengertian Kapasitas Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

“Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai

tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Serta Proses untuk memperoleh, melatih, menilai, dan mengompensasi karyawan dan untuk mengurus relasi tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan, serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan.”

Menurut Herman Sofyandi dalam R. Supomo dan Eti Nurhayati (2018:6), pengertian Kapasitas Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

“Suatu strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen mulai dari *planning, organizing, leading, dan controlling* dalam setiap aktivitas/fungsi operasional SDM mulai dari proses penarikan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penempatan yang meliputi promosi, demosi, transfer, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, hubungan industrialisasi, hingga pemutusan hubungan kerja, yang ditujukan bagi peningkatan kontribusi produktif dari SDM organisasi terhadap pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien.”

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kapasitas Sumber Daya Manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas serta tanggungjawabnya didalam organisasi dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang memadai untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

2.1.2.2. Indikator Kapasitas SDM

Menurut Notoatmodjo, Soekidjo. (2018:16), Kapasitas Sumber Daya Manusia dapat diukur melalui:

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia. Pendidikan adalah proses sistematis mengubah tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan organisasi. Pendidikan dapat dibagi menjadi: (a) pendidikan formal, (b) pendidikan informal, (c) pendidikan nonformal.

2. Pelatihan

Pelatihan yang baik, harus berkaitan dengan keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaannya. pelatihan adalah usaha untuk memperbaiki performa pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya.

3. Pengalaman

Pengalaman dilihat dari lamanya seseorang bekerja. Dengan pengalaman, seseorang akan terbiasa melakukan suatu pekerjaan dan mempunyai wawasan yang luas serta mudah beradaptasi dengan lingkungan.

Menurut Delanno dan Devi (2013), Kapasitas SDM dapat diukur melalui:

1. Latar belakang pendidikan
2. Pelatihan
3. Pengalaman
4. Tanggung jawab

Berdasarkan uraian diatas, indikator Kapasitas Sumber Daya Manusia yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari hasil modifikasi peneliti, diantaranya: latar belakang pendidikan, pelatihan, pengalaman, dan tanggung jawab.

2.1.3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.1.3.1. Pengertian Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Lilis Puspitawati & Sri Dewi Anggradini (2011:6), pengertian Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

“Sistem akuntansi pemerintahan daerah yang meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan,

pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.”

Menurut Sutabri (2014:3), pengertian Pemanfaatan Teknologi

Informasi adalah sebagai berikut:

“Suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.”

Menurut Mulyadi (2014:21), pengertian Pemanfaatan Teknologi

Informasi adalah sebagai berikut:

“Pemanfaatan teknologi informasi adalah yang mencakup komputer (baik perangkat keras dan perangkat lunak), berbagai peralatan kantor elektronik, perlengkapan pabrik dan telekomunikasi.”

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa

Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah perbuatan memanfaatkan seperangkat alat yang digunakan manusia untuk membantu memproses informasi, menyimpan, dan kemudian mengkomunikasikan atau menyampaikan informasi.

2.1.3.2. Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Lilis Puspitawati & Sri Dewi Anggradini (2011:13),

Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat diukur melalui:

1. Pemanfaatan komputer

Komputer dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam bisnis, membuat data yang akurat dan tidak bias tersedia bagi pemilik bisnis, pihak terkait dan mereka juga membantu arus informasi

dengan mendukung pembuatan keputusan kelompok / tim dalam bisnis atau organisasi. Setiap bisnis menggunakan komputer dengan cara yang berbeda, namun masing-masing bisnis ini merasakan dampak dalam penggunaan komputer tersebut. Namun, sama seperti teknologi bisnis lainnya, komputer memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri.

2. Penggunaan *software* akuntansi

Sebuah program aplikasi yang memang dirancang khusus untuk mempermudah pekerjaan para akuntan dalam pencatatan transaksi usaha yang sama dengan apa yang dilakukan secara manual.

Menurut Suyanto (2005:11), Pemanfaatan Teknologi Informasi dapat diukur melalui:

1. Perangkat Keras Komputer (Hardware)

Perangkat keras bagi suatu system informasi terdiri atas masukan dan keluran. Sebagai unit meyimpan file dan sebagainya, peralatan, penyiapan data dan terminal masukan dan keluaran.

2. Perangkat Lunak Komputer (Software)

Seperti system perangkat lunak yang dikembangkan guna mendukung pendistribusian data dan informasi seperti system pengoprasian. Dikembangkan juga beberapa metode dan aplikasi dan sistem yang berbasis computer untuk memenuhi kebutuhan pengguna, contohnya: e-commerce, DSS (Decision Support System), e-banking, SAP, dan sebagainya.

3. Jaringan dan Komunikasi

Jaringan dan komunikasi merupakan sebuah sistem yang mampu menghubungkan dan menggabungkan beberapa titik komunikasi menjadi satu kesatuan yang mampu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Berbagai macam cara digunakan untuk memepermudah dan menjaga kualitas kualitas hubungan melalui

internet. Sejak saat itulah perkembangan alat-alat yang menyokong kemampuan jaringan untuk saling berhubungan berjalan dengan pesat

Berdasarkan uraian diatas, indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hasil modifikasi peneliti, diantaranya: Pemanfaatan komputer (Hardware dan Software), dan penggunaan jaringan komunikasi.

2.1.4. Akuntabilitas Publik

2.1.4.1. Pengertian Akuntabilitas Publik

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang SAP menyatakan bahwa Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Definisi Akuntabilitas publik Menurut Indra Bastian (2010:385) akuntabilitas publik adalah sebagai berikut :

“Akuntabilitas publik adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang atau badan hukum dan pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangna untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Pengertian akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2013:18) adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam melakukan akuntabilitas publik, organisasi sektor

publik berkewajiban memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik itu antara lain: 1) Hak untuk tahu (*right to know*), 2) Hak untuk diberi informasi (*right to be informed*), dan 3) Hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*). Organisasi sektor publik dituntut untuk tidak sekedar melakukan akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*), yaitu pelaporan kepada atasan, akan tetapi juga melakukan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*), yaitu pelaporan kepada masyarakat luas.”

Pengertian akuntabilitas publik menurut Penny Kusumastuti Lukito

(2014:2) menyatakan bahwa:

“Akuntabilitas adalah kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerja.”

Pengertian menurut Mahmudi (2016:19) dalam pengertian akuntabilitas

publik adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas Publik adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi manfaat (*principal*).

2.1.4.2. Indikator Akuntabilitas Publik

Menurut Mahmudi (2016:20), dimensi akuntabilitas yang telah di jelaskan dimensi tersebut dapat di turunkan menjadi indikator akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran.
 - a. Kepatuhan terhadap hukum.
 - b. Penghindaran korupsi dan kolusi.
2. Akuntabilitas Proses.
 - a. Kepatuhan terhadap Prosedur.
 - b. Adanya pelayanan publik yang responsif

- c. Adanya pelayanan publik yang cermat.
 - d. Adanya pelayanan publik dengan biaya murah.
3. Akuntabilitas program.
- a. Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal.
 - b. Mempertanggungjawabkan yang telah dibuat.
4. Akuntabilitas Kebijakan
- a. Mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil.
 - b. Mempertimbangkan dampak di masa depan

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan

Menurut Warisno (2008:48), menjelaskan bahwa kaitan antara Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan yaitu Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik sehingga terciptanya keterandalan pelaporan keuangan. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada laporan keuangan yang tidak andal dan juga menghasilkan ketidaksesuaian laporan standar yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Desmiyawati (2014:163-178), menjelaskan bahwa kaitan antara Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan yaitu SDM yang bersikap oportunitis akan menghasilkan keterandalan pelaporan keuangan yang baik. Tanggungjawab

yang ditunjukkan pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif tidak hanya berupa penyajian keterandalan pelaporan keuangan yang lengkap dan wajar, tetapi juga bagaimana mereka mampu membuka akses untuk para pengguna laporan keuangan yang andal.

Dalam hasil pengujian menurut Kadek Hengki Primayana, Anantawikrama Tungga Atmadja, Nyoman Ari Surya Darmawan (2014), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa memadainya kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap meningkatnya keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Adapun hasil penelitian menurut Dewi Kusuma Wardani, Ika Andriyani (2017), menunjukkan bahwa memadainya kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap meningkatnya keterandalan pelaporan keuangan.

Sementara itu, hasil penelitian menurut Iskandar Muda, Deni Yuwilia Wardani, Erlina, Azhar Maksun, Ade Fatma Lubis, Rina Bukit & Erwin Abubakar (2017), menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

2.2.2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan

Menurut Azhar Susanto (2013:75), menjelaskan bahwa kaitan antara Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Sistem informasi akuntansi dapat berjalan dengan baik didukung oleh komponen-komponen system informasi akuntansi seperti; hardware, software, brainware, procedure, database, communication network dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan keterandalan pelaporan keuangan.”

Menurut Jogiyanto (2003:2), menjelaskan bahwa kaitan antara Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Pemanfaatan teknologi sistem informasi akuntansi meliputi teknologi komputer, internet dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah akan lebih optimal menghasilkan keterandalan pelaporan keuangan yang baik”

Dalam hasil pengujian menurut Karmila, Amries Rusli Tanjung, Dan Edfan Darlis (2014), kaitan antara Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan hasilnya mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

Adapun hasil penelitian menurut Darwanis (2009), menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan.

Sementara itu, menurut hasil penelitian Desi Dwi Mahyani (2009), menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan.

2.2.3. Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan

Menurut Mardiasmo (2015:21), menjelaskan bahwa kaitan antara Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

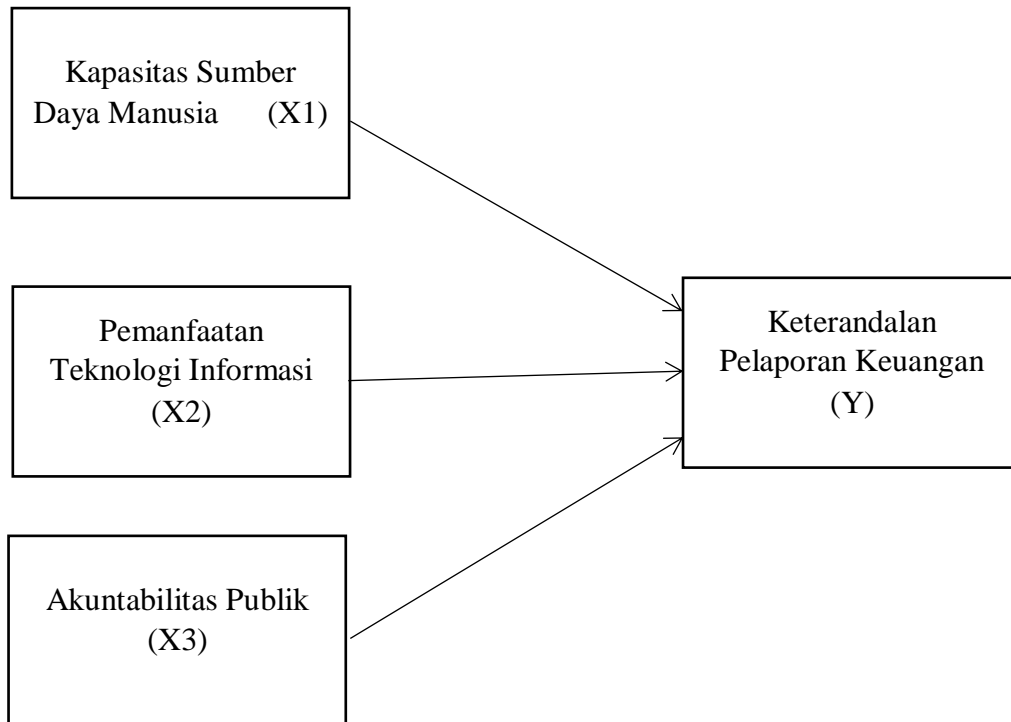
“Akuntabilitas keuangan terkait dengan penghindaran penyalahgunaan dana public. Tahap-tahap dalam akuntabilitas laporan keuangan, mulai dari perumusan rencana keuangan atau penganggaran, pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, evaluasi atas kinerja keuangan, dan pelaksanaan pelaporannya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa keterandalan pelaporan keuangan adalah bentuk akuntabilitas pemerintahan untuk itu keterandalan pelaporan keuangan pemerintah harus disusun secara komprehensif”

Menurut Mardiasmo (2002:36), menjelaskan bahwa kaitan antara Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

“Akuntabilitas pemerintahan menjadi fokus utama masyarakat karena akuntabilitas dapat mencegah terjadinya praktek korupsi seperti yang terjadi, karena itu akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik membuat keterandalan pelaporan keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak luar.”

Dalam hasil pengujian menurut Made Budi Sastra Wiguna dkk (2015) menunjukkan bahwa secara parsial Akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

Tabel 2.1.
Paradigma Penelitian



Keterangan:

—> : Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

2.3. Hipotesis

Berdasarkan kerangka berfikir diatas, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1 : Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan

H2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan

H3 : Akuntabilitas Publik berpengaruh positif terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan